

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Handling Slum Settlement Areas in Sumpang Binangae Village, Barru District, Barru Regency

Marwah^{1*}, Rudi Latief², Muh. Iqbal S. Suhaeb²

¹Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barru

²Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*E-mail: marwahh012@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Analisis chi kuadrat dan uji kontingensi digunakan untuk identifikasi faktor, sementara analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sepuluh faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh, yaitu pendapatan, pendidikan, mata pencaharian, jumlah anggota keluarga, kondisi bangunan, penyediaan air minum, kondisi jaringan jalan, kondisi jaringan drainase, kondisi pengolahan air limbah, dan kondisi pengolahan persampahan. Faktor status kepemilikan lahan tidak berpengaruh signifikan. Strategi pengendalian permukiman kumuh meliputi: (1) Pengembangan kawasan permukiman sesuai Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (2) Pemanfaatan peran pemerintah berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait pembinaan, penyelenggaraan kawasan, pemeliharaan dan perbaikan, serta peningkatan kualitas; (3) Pemanfaatan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan permukiman kumuh melalui program pemerintah terkait Peraturan Menteri PUPR No 2 tahun 2016 mengenai peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sertifikasi hak atas tanah; (4) Peningkatan program penanganan kumuh dengan meningkatkan kualitas permukiman dan fasilitas penunjang; (5) Sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah pencemaran air bersih dengan tidak membuang sampah di laut.

Kata Kunci: Strategi Penanganan: Kumuh Perkotaan: Permukiman Kumuh

Abstract. This study used quantitative and qualitative methods to identify factors affecting slums in Sumpang Binangae urban village, Barru sub-district, Barru district. Chi squared analysis and contingency test were used for factor identification, while SWOT analysis was used to formulate slum upgrading strategies. The results showed that there are ten factors that influence the formation of slums, namely income, education, livelihood, number of family members, building conditions, drinking water supply, road network conditions, drainage network conditions, wastewater treatment conditions, and solid waste treatment conditions. The land ownership status factor has no significant effect. Slum control strategies include: (1) Development of residential areas in accordance with Law No 26 of 2007 on Spatial Planning; (2) Utilisation of the government's role based on Law No 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas related to guidance, area implementation, maintenance and repair, and quality improvement; (3) Utilisation of community awareness in supporting slum upgrading through government programs related to PUPR Ministerial Regulation No 2 of 2016 regarding improving the quality of slums and certifying land rights; (4) Improvement of slum upgrading programs by improving the quality of settlements and supporting facilities; (5) Socialisation to the community to prevent clean water pollution by not throwing garbage in the sea..

Keywords: Handling Strategy: Urban Slum: Slum Settlement



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Tujuan umum permukiman perkotaan adalah menciptakan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan ini mencakup dua aspek utama: pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap

infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan; kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah (Anugrah Valentine, 2018).

Kawasan permukiman kumuh adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota besar di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Telaah tentang kawasan permukiman kumuh umumnya mencakup tiga segi: kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas, dan dampak dari kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik terlihat dari bangunan yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi, serta sampah yang belum dikelola dengan baik (Bayu, 2016; Budiharjo, 2011). Penanganan permasalahan permukiman kumuh ini penting sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Permukiman kumuh sering kali berada pada ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi permukiman, seperti di daerah sempadan atau lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (squatters). Kondisi ini menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan atau bangunan yang tinggi (Cora, 2012). Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan tinggi, serta mengancam kesehatan penghuni.

Meningkatnya kebutuhan ruang di daerah perkotaan menyebabkan masyarakat tinggal dan membangun permukiman di daerah yang berdampingan dengan pusat kegiatan perkotaan. Contohnya, Kelurahan Sumpang Binangae di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Menurut SK Bupati Nomor 345/BAPPEDA/VIII/2014, Kelurahan Sumpang Binangae ditetapkan sebagai kawasan kumuh sedang. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk membenahi kawasan kumuh di Kabupaten Barru, termasuk di Kelurahan Sumpang Binangae. Namun, belum ada perubahan signifikan dalam kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah tersebut.

Masalah permukiman kumuh mencakup berbagai aspek, mulai dari fisik, sosial, hingga ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi fisik yang buruk sering kali berhubungan erat dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut (Diana, 2015; Resa et al., 2017). Permukiman kumuh biasanya ditandai dengan kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, dan kepadatan bangunan yang tinggi, yang semuanya berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat (Muhajir, 2017). Selain itu, masalah sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan dan penghasilan juga memperparah kondisi permukiman kumuh (Muvidayanti, 2018).

Permukiman kumuh telah menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan, ekonomi,

dan kualitas hidup masyarakat (UN-Habitat, 2022). Data terbaru menunjukkan bahwa kondisi permukiman kumuh di banyak kota besar dunia, termasuk di Indonesia, semakin memburuk akibat urbanisasi yang cepat dan tidak terkendali (World Bank, 2023). Menurut laporan terbaru oleh UN-Habitat (2022), lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia tinggal di permukiman kumuh, yang sering kali kekurangan akses ke layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak.

Dalam konteks Indonesia, studi oleh Sari et al. (2021) menyoroti bahwa permukiman kumuh sering kali berkembang di daerah-daerah perkotaan yang padat penduduk dan kurang pengawasan. Penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, seperti penghasilan rendah dan ketidakstabilan pekerjaan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah permukiman kumuh. Selain itu, studi oleh Rahmawati et al. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program-program peningkatan kualitas lingkungan sangat penting untuk keberhasilan upaya revitalisasi permukiman kumuh.

Penelitian terbaru oleh Sari et al. (2021) dan Rahmawati et al. (2023) menekankan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek fisik dan sosial ekonomi dalam menangani masalah permukiman kumuh. Mereka menemukan bahwa intervensi yang hanya fokus pada satu aspek sering kali tidak cukup efektif dan berkelanjutan.

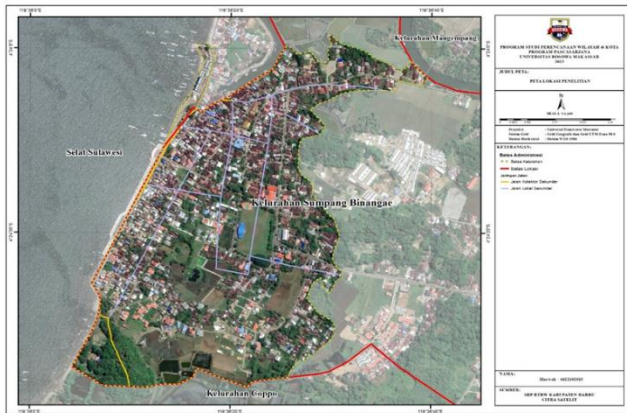
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami faktor-faktor penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae secara komprehensif. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur tentang permukiman kumuh, khususnya dalam konteks perkotaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan solusi berbasis bukti yang dapat diterapkan dalam program-program penanganan permukiman kumuh lainnya di berbagai daerah. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan program-program intervensi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.

Metode Penelitian

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas wilayah 1,8 km² dan terletak pada koordinat geografis LS 4°47'35" BT 119°49'16". Batas-batas wilayah administrasi kelurahan ini

meliputi Kelurahan Mangempang di utara, Kelurahan Coppo di selatan, Kelurahan Tuwung di timur, dan Selat Sulawesi di barat, dengan fokus penelitian pada Lingkungan Limpo Majang dan Lingkungan Sumpang.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

b. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis rumusan masalah asosiatif yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel-variabel penelitian ditentukan berdasarkan kajian teori yang relevan, dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh kembangnya permukiman kumuh. Variabel-variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Indikator	Parameter
1	Y = Permukiman Kumuh	$Y_1 = >50\%$	Dikatakan berat apabila responden merasa kualitas lingkungan permukimannya sudah buruk.
		$Y_2 = 30 - 49 \%$	Dikatakan sedang apabila responden merasa kualitas lingkungan permukimannya masih tidak terlalu buruk.
		$Y_3 = 0 - 29 \%$	Dikatakan ringan apabila responden merasa kualitas lingkungan permukimannya masih nyaman untuk di huni
2	$X_1 =$ Faktor Pendapatan	$X_{1.1} =$ Tinggi	Dikatakan tinggi apabila responden memiliki penghasilan diatas UMR atau > 2 juta perbulan.
		$X_{1.2} =$ Sedang	Dikatakan sedang apabila responden memiliki penghasilan setara dengan UMR atau 1,5 - 2 juta/bulan.
		$X_{1.3} =$ Rendah	Dikatakan rendah apabila responden memiliki penghasilan di bawah UMR atau < 1,5 juta/bulan.
3	$X_2 =$ Faktor Tingkat Pendidikan	$X_{2.1} =$ Tinggi	Dikatakan tinggi apabila responden menempuh Pendidikan sampai SMA – Sarjana.
		$X_{2.2} =$ Sedang	Dikatakan sedang apabila responden menempuh Pendidikan sampai SMP.
		$X_{2.3} =$ Rendah	Dikatakan rendah apabila responden menempuh Pendidikan sampai SD.
4	$X_3 =$ Faktor Mata Pencarian	$X_{3.1} =$ Tetap	Dikatakan tetap apabila responden memiliki pekerjaan yang tetap.
		$X_{3.2} =$ Part Time	Dikatakan part time apabila responden memiliki pekerjaan yang belum tetap.
		$X_{3.3} =$ Tidak Jelas	Dikatakan tidak jelas apabila responden memiliki pekerjaan yang tidak menentu.
5	$X_4 =$ Faktor Anggota Keluarga	$X_{4.1} =$ Rendah	Dikatakan rendah orang apabila responden memiliki 1 - 3 orang anggota keluarga dalam satu rumah.
		$X_{4.2} =$ Sedang	Dikatakan sedang orang apabila responden memiliki 4 - 5 orang anggota keluarga dalam satu rumah.
		$X_{4.3} =$ Tinggi	Dikatakan tinggi orang apabila responden memiliki > 5 orang anggota keluarga dalam satu rumah.
6	$X_5 =$ Faktor Kepemilikan Lahan	$X_{5.1} =$ Sewa	Dikatakan sewa apabila responden menempati lahan yang di sewa.
		$X_{5.2} =$ Milik keluarga	Dikatakan milik keluarga apabila responden menempati lahan yang dimiliki oleh keluarga.
		$X_{5.3} =$ Milik sendiri	Dikatakan milik sendiri apabila responden menempati lahan yang dimiliki sendiri.
7	$X_6 =$ Faktor Kondisi Bangunan Gedung	$X_{6.1} =$ Baik	Dikatakan baik apabila responden menempati bangunan rumah yang atapnya terbuat dari seng atau genteng, dindingnya terbuat dari tembok, dan lantainya terbuat dari ubin.
		$X_{6.2} =$ Kurang Baik	Dikatakan kurang baik apabila responden menempati bangunan rumah yang atapnya terbuat dari seng, dindingnya terbuat dari papan, lantainya terbuat dari semen.
		$X_{6.3} =$ Buruk	Dikatakan buruk apabila responden menempati bangunan rumah yang atapnya terbuat dari rumbia, dindingnya terbuat dari seng, dan lantainya terbuat dari tanah.
8		$X_{7.1} =$ Baik	Dikatakan baik apabila konstruksi jalan terbuat dari aspal hotmix.

No	Variabel Penelitian	Indikator	Parameter
9	X ₇ = Faktor Kondisi Jalan Lingkungan	X _{7.2} = Kurang Baik	Dikatakan kurang baik apabila konstruksi jalan terbuat dari aspal buras
		X _{7.3} = Buruk	Dikatakan buruk apabila konstruksi jalan terbuat dari pengerasan.
		X _{8.1} = Baik	Dikatakan baik apabila kondisi penyediaan air minum memenuhi standar >60 liter/hari/orang
9	X ₈ = Faktor Kondisi Penyediaan Air Minum	X _{8.2} = Kurang Baik	Dikatakan kurang baik apabila kondisi penyediaan air minum memenuhi standar 40 – 50 liter/hari/orang
		X _{8.3} = Buruk	Dikatakan buruk apabila kondisi penyediaan air minum memenuhi standar < 40 liter/hari/orang.
		X _{9.1} = Baik	Dikatakan baik apabila kondisi drainase lingkungan di sekitar rumah responden berupa drainase teknis.
10	X ₉ = Faktor Kondisi Drainase Lingkungan	X _{9.2} = Kurang Baik	Dikatakan kurang baik apabila kondisi drainase lingkungan di sekitar rumah responden berupa drainase semi.
		X _{9.3} = Buruk	Dikatakan buruk apabila kondisi drainase lingkungan di sekitar rumah responden berupa drainase terbuat dari tanah.
		X _{10.1} = Baik	Dikatakan baik apabila kondisi pengelolaan limbah di sekitar rumah responden menggunakan pengolahan limbah teknis.
11	X ₁₀ = Faktor Kondisi Pengelolaan Limbah	X _{10.2} = kurang	Dikatakan kurang baik apabila kondisi pengelolaan limbah di sekitar rumah responden menggunakan pengolahan Sebagian limbah teknis dan Sebagian tanah .
		X _{10.3} = Buruk	Dikatakan buruk apabila kondisi pengelolaan limbah di sekitar rumah responden menggunakan pengolahan limbah terbuat dari tanah.
		X _{11.1} = Baik	Dikatakan baik apabila kondisi pengelolaan persampahan di sekitar rumah responden menggunakan armada pengangkut sampah.
12	X ₁₁ = Faktor Pengelolaan Persampahan	X _{11.2} = Kurang Baik	Dikatakan kurang baik apabila kondisi pengelolaan persampahan di sekitar rumah responden menggunakan bakar atau di timbun.
		X _{11.3} = Buruk	Dikatakan buruk apabila kondisi pengelolaan persampahan di sekitar rumah responden membuang sampah langsung ke laut.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, kuesioner, dan kajian kepustakaan.

- 1) Observasi Observasi dilakukan dengan mengamati objek secara langsung di lokasi penelitian dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Objek yang diobservasi meliputi variabel-variabel yang telah diidentifikasi seperti kondisi bangunan, jalan, drainase, penyediaan air minum, pengolahan limbah, dan persampahan.
- 2) Kuesioner Kuesioner disusun dalam bentuk daftar pernyataan yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan data terkait partisipasi masyarakat, interaksi sosial, kondisi sarana dan prasarana permukiman, tingkat pendidikan, dan sosialisasi dari pemerintah setempat. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data lengkap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae.
- 3) Kajian Kepustakaan Kajian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian dan memberikan dasar untuk jawaban sementara (hipotesis). Uraian penelitian terdahulu yang relevan juga dimuat untuk mendukung aspek-aspek penelitian yang akan dilakukan.

d. Teknik Analisis Data

- 1) Analisis Chi Kuadrat Analisis Chi-Square digunakan untuk menguji hipotesis pertama yang melibatkan dua variabel

nominal. Analisis ini berguna untuk menguji pengaruh antara dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel-variabel tersebut (McHugh, 2013). Rumus yang digunakan adalah:

$$x^2 = \left[\frac{(F_o - F_h)^2}{F_h} \right]$$

di mana F_h adalah frekuensi yang diamati dan F_h adalah frekuensi yang diharapkan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai X² hitung dengan X² tabel (Agregti, 2007).

2) Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah kedua. SWOT berfungsi untuk menentukan strategi pengembangan dengan mempertimbangkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) (Gürel & Tat, 2017). Langkah-langkah dalam analisis SWOT meliputi identifikasi indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta evaluasi faktor internal dan eksternal. Formulasi strategi dilakukan dengan menggabungkan elemen SWOT yang relevan. Hasil analisis SWOT akan dibahas bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menetapkan prioritas dan strategi yang paling efektif dalam menangani masalah permukiman kumuh (Pickton & Wright, 1998).

Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran dan Karakteristik Wilayah Penelitian

1) Bangunan Gedung

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan, kondisi bangunan gedung di Kawasan Lingkungan Limpo Majang dan Lingkungan Sumpang memiliki ketidak teraturan bangunan yang memiliki permasalahan permasalahan pada atap yang masih ada beberapa rumah yang kurang layak, apabila turun hujan membasahi dalam rumah. Kondisi dinding yang masih adanya beberapa rumah masih menggunakan dinding dari atap bekas. Begitupun dengan kondisi lantai yang beberapa rumah masih menggunakan lantai dasar yang membuat tingkat kenyamanan berkurang.

2) Kondisi Jalan Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi jalan lingkungan masih belum memenuhi minimum lebar badan jalan 6,5 meter sehingga apabila dalam keadaan mendesak membuat mobil ambulans tidak bisa menjemput masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan Kondisi spesifikasi dilokasi penelitian masih cukup banyak menggunakan jalan tanah, sedangkan jalan aspal hanya beberapa ruas yang dalam keadaan baik, selebihnya aspal dalam keadaan buruk. Jaringan jalan merupakan prasarana penghubung antar wilayah atau kawasan, oleh karena itu dibutuhkan sasaran rencana dengan ketentuan standar kebutuhan pelayanan yang berlaku.

3) Kondisi Penyediaan Air Bersih

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi penyediaan air bersih sudah terpenuhi secara kuantitas dan kualitas, seperti yang kita ketahui air minum/ bersih merupakan suatu kebutuhan pokok di kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara oleh masyarakat sumber air yang digunakan lebih dominan sudah menggunakan air PDAM untuk air minum. Air bersih menjadi syarat mutlak yang harus tersedia disetiap wilayah untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat karena air bersih adalah kebutuhan pokok setiap individu guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

4) Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan hasil obsevasi pengamatan langsung di lapangan kondisi sistem jaringan drainase yang terdapat di lokasi penelitian merupakan sistem jaringan drainase terbuka yang mengikuti pola jaringan jalan. Kondisi drainase masih kurang baik karena belum mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan/banjir Ketika terjadi hujan.

5) Kondisi Pengolahan Air Limbah

Aktivias mandi, buang air kecil, buang air besar, mencuci dan sebagainya pasti menghasilkan air limbah. Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di

lapangan kondisi pengelolaan air limbah di lokasi penelitian belum baik karena sistem pengolahan air limbah tiap rumah belum sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

6) Pengolahan Persampahan

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi pengelolaan persampahan cenderung kurang maksimal dalam pengelolaannya, sarana persampahan di Kawasan lingkungan Limpo Majang dan Lingkungan Sumpang tidak terpenuhi, akibatnya pengelolaan persampahan di masyarakat menjadi kumuh dan kurang dikelola dengan baik, didukung dengan prasarana persampahan dilokasi penelitian juga tidak terpenuhi seperti tidak adanya tempat penampungan sementara (TPS) yang layak untuk pengelolaan sampah.

Akibatnya sarana dan prasarana persampahan yang cenderung tidak terpenuhi membuat masyarakat dilokasi penelitian melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara di bakar tiap hari bahkan Sebagian lainnya membuang sampah di laut.

Oleh karena itu dibutuhkan sasaran rencana kebutuhan pelayanan persampahan yang dikategorikan berdasarkan jumlah kebutuhan penduduk pendukung dan kebutuhan aktivitas perkotaan. Standar kebutuhan pelayanan tersebut berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diatas termasuk sasaran penggunaannya, antara lain:

- a) 60-80% produksi sampah (80-90% komersial dan 50-80% permukiman, 100% untuk permukiman dengan kepadatan 100 jiwa/Ha) terlayani dengan asumsi.
- b) Timbunan sampah 2-35 ltr/orang/hr untuk non komersial dan 0,2-0,6 lt/m²/hr untuk komersial.

7) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan salah satu pendukung dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di dalam suatu wilayah. Adapun jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Sumpang Binangae terdapat 3 unit TK, 2 unit SD, 1 unit SMP dan 1 unit SMA.

Dilihat dari hasil observasi dan pengamatan di lokasi penelitian bahwa kebutuhan untuk pembangunan sarana pendidikan di lokasi penelitian dengan jumlah penduduk sebanyak 10.713 jiwa membutuhkan 7 unit SD, berdasarkan standar kebutuhan pelayanan dengan ketentuan tingkat pelayanan SD untuk setiap 1.600 penduduk dengan radius pencapaian 1.000 meter.

8) Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan ialah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Jumlah sarana kesehatan dirinci menurut jenisnya di Kelurahan Sumpang Binangae terdiri dari: 2 unit Posyandu, 1 unit tempat praktek. Kondisi tersebut belum memenuhi standar pelayanan permukiman yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Posyandu untuk setiap 1.250 jiwa dengan radius pencapaian 500 meter.
- b) Balai Pengobatan untuk setiap 2.500 jiwa dengan radius pencapaian 1000 meter.

Berdasarkan standar kebutuhan pelayanan diatas, bahwa untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat perlu penambahan pembangunan sarana kesehatan sebanyak 7 unit Posyandu, 3 unit Balai Pengobatan dan 1 unit puskesmas.

9) Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut keyakinan/kepercayaan masing-masing. Jumlah sarana peribadatan di lokasi penelitian hanya terdapat 4 unit Masjid.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan rohani masyarakat maka diperlukan sarana peribadatan. Dilihat dari kondisi eksisting lokasi penelitian dan standar pelayanan tersebut bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan peribadatan, maka tidak perlu di lakukan penambahan karena sudah sesuai.

10) Aspek Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan hidup ini erat kaitannya dengan penghasilan seseorang.

Tingkat pendapatan masyarakat di lokasi penelitian masih rendah, rendahnya pendapatan masyarakat karena kurangnya keterampilan masyarakat setempat, hal ini disebabkan oleh masyarakat Kelurahan Sumpang Binangae bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, buruh harian dan pegawai.

b. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae.

Budiharjo (2011), terdapat lima faktor atau variabel yang mempengaruhi permukiman kumuh, yaitu pendapatan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, jumlah anggota keluarga, dan status kepemilikan lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018, terdapat enam faktor atau variabel yang mempengaruhi permukiman kumuh, yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan limbah, dan pengolahan persampahan.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis chi-kuadrat terhadap sebelas variabel tersebut dengan permukiman kumuh, nilai hubungan kontingensi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap permukiman kumuh dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kesimpulan Hasil Uji Chi-Kuadrat pada Tiap Variabel

No.	Variabel	Nilai X ²	Nilai X Tabel 5%	Keterangan	Nilai Hubungan Kontingensi (C)	Hubungan Kontingensi (C)
1	Faktor Pendapatan	66,857	9.49	Pengaruh signifikan	0,52	Sedang
2	Faktor Tingkat Pendidikan	41,217	9.49	Pengaruh signifikan	0,43	Sedang
3	Kemau Faktor Mata Pencaharian	64,351	9.49	Pengaruh signifikan	0,51	Sedang
4	Faktor Anggota Keluarga	41,089	9.49	Pengaruh signifikan	0,43	Sedang
5	Faktor Kepemilikan Lahan	18,281	9.49	Pengaruh signifikan	0,30	Lemah
6	Faktor Kondisi Bangunan Gedung	39,479	9.49	Pengaruh signifikan	0,42	Sedang
7	Faktor Kondisi Jalan Lingkungan	36,688	9.49	Pengaruh signifikan	0,41	Sedang
8	Faktor Kondisi Penyediaan Air Minum	35,683	9.49	Pengaruh signifikan	0,41	Sedang
9	Faktor Kondisi Drainase Lingkungan	36,323	9.49	Pengaruh signifikan	0,41	Sedang
10	Faktor Kondisi Pengelolaan Limbah	35,410	9.49	Pengaruh signifikan	0,41	Sedang
11	Faktor Pengelolaan Persampahan	48,990	9.49	Pengaruh signifikan	0,46	Sedang

Sumber: Olah Data, 2023

Dari sebelas variabel yang dianalisis, berdasarkan nilai hubungan kontingensi, terdapat sepuluh variabel yang memiliki pengaruh sedang terhadap permukiman kumuh. Urutan pengaruh masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Urutan Hasil Kesimpulan Nilai Hubungan Kontingensi (C) Tiap Variabel

No	Variabel	Nilai Hubungan Kontingensi (C)	Urutan
1	Faktor Pendapatan	0.52 sedang	1
2	Faktor Mata Pencaharian	0.51 sedang	2
3	Faktor Pengolahan Persampahan	0.46 sedang	3
4	Faktor Pendidikan	0.43 sedang	4

No	Variabel	Nilai Hubungan Kontingensi (C)	Urutan
5	Faktor Anggota Keluarga	0.43 sedang	5
6	faktor Kondisi Bangunan Gedung	0.42 sedang	6
7	Faktor Kondisi Jalan Lingkungan	0.41 sedang	7
8	Faktor Kondisi Drainase Lingkungan	0.41 sedang	8
9	Faktor Penyediaan Air Minum	0.41 sedang	9
10	Faktor Kondisi Pengolahan Limbah	0.41 sedang	10

Sumber: Olah Data, 2023

Kesepuluh variabel yang memiliki pengaruh sedang disimpulkan sebagai variabel yang signifikan mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae. Hal ini disebabkan oleh hasil uji chi-kuadrat yang menunjukkan bahwa kesepuluh variabel tersebut memiliki

nilai pengaruh signifikan tertinggi dibandingkan dengan satu variabel lain yang hanya memiliki pengaruh signifikan namun lemah.

Variabel-variabel tersebut adalah pendapatan, mata pencaharian, pengelolaan persampahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, penyediaan air minum, dan pengelolaan limbah. Berdasarkan hasil analisis ini, faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae telah diidentifikasi. Faktor-faktor ini akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae.

c. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap variabel melalui penyebaran kuesioner dan perhitungan uji chi-kuadrat, disimpulkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menjadi faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae.

Hasil nilai skor Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan External Factor Analysis Summary (EFAS) dianalisis untuk melihat faktor mana yang lebih berpengaruh dalam permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae. Hal ini ditentukan dari nilai akumulatif skor IFAS dan EFAS, dimana:

- IFAS (Kekuatan + Kelemahan) = 3,80 + 2,45 = 6,25
- EFAS (Peluang + Ancaman) = 3,76 + 2,65 = 6,41

Dari hasil di atas, terlihat bahwa nilai EFAS lebih besar daripada nilai IFAS (6,41 > 6,25). Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal lebih berpengaruh terhadap permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae. Untuk menentukan strategi utama yang digunakan dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae, dilakukan dengan menentukan koordinat titik X dan Y melalui IFAS (kekuatan – kelemahan) sebagai titik X dan EFAS (peluang – ancaman) sebagai titik Y.

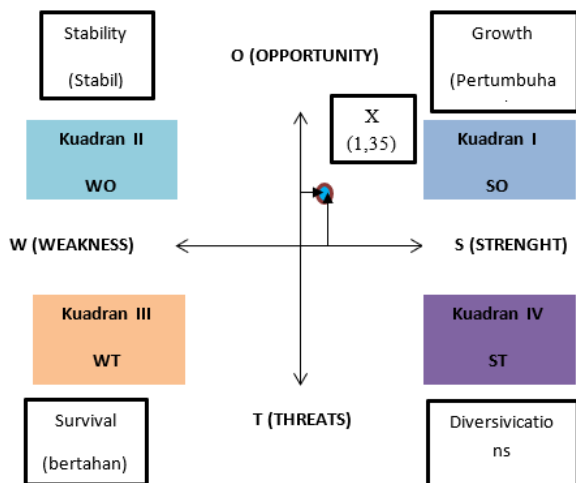
- IFAS (Kekuatan - Kelemahan) = 3,80 - 2,45 = 1,35
- EFAS (Peluang - Ancaman) = 3,76 - 2,65 = 1,11

Tabel 4. Matriks SWOT Rumusan Strategi Pengoptimalan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae

Internal	Kelemahan (Weakness)	Kekuatan (Strength)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah 2. Banyaknya anggota keluarga dalam satu rumah 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat setempat cenderung rendah karena di dominasi lulusan SD dan SMP 4. Masih adanya bangunan rumah dengan konstruksi tidak layak huni 5. Belum terlayani pengangkutan persampahan dari rumah serta terbatasnya ketersediaan sarana persampahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status kepemilikan lahan masyarakat sebagian besar milik sendiri 2. Terpenuhinya sumber air bersih untuk masyarakat setempat berupa PDAM 3. Bangunan Gedung mencerminkan desain rumah panggung
Eksternal	Strategi WO (Turn Around Strategies)	Strategi SO (Agressive Strategies)
Peluang (Opportunity)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3. Permen PUPR nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 4. Sudah memiliki program penanganan kumuh yaitu KOTAKU. 5. Masyarakat mendukung terhadap proses penanganan kumuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan permukiman yang berlandaskan Undang-undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 2. Memanfaatkan peran pemerintah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan pembinaan, penyelenggaraan Kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 3. Memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan permukiman kumuh melalui program pemerintah terkait Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pasal 20 ayat 3 mengenai kepemilikan dokumen sertifikat hak atas tanah atau dokumen keterangan status tanah yang sah bagi masyarakat sebagian kecil yang belum memilikinya.

Ancaman (Threat)	Strategi WT (Defensive Strategies)	Strategi ST (Diversification Strategies)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya penumpukan sampah di pinggir laut yang akan mengakibatkan pencemaran laut. 2. Tingginya jumlah penduduk sehingga beresiko munculnya permukiman baru. 3. Adanya daerah-daerah yang tergenang pada saat turun hujan dikarenakan system drainase yang kurang efektif. 4. Masyarakat mendukung terhadap proses penanganan kumuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi peningkatan Sumber daya manusia dengan memberi sosialisasi tentang pentingnya pendidikan. 2. pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat dan penegakan aturan sanksi dalam membuang sampah di pinggir laut. 3. ngawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan permukiman baru yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 4. Penyediaan sarana pengolahan air limbah yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan program penanganan kumuh dengan cara peningkatan kualitas permukiman dan fasilitas penunjangnya. 5. Pencegahan pencemaran air bersih dengan cara tidak membuang sampah di laut. 6. Peningkatan sarana pendukung produktifitas komoditas nelayan .

Sumber: Olah Data, 2023



Gambar 2 Analisis Kuadran SWOT

Titik X dan Y dari hasil IFAS dan EFAS menunjukkan berada pada kuadran I dengan nilai $X = 1,35$ dan nilai $Y = 1,11$. Yang berarti rumusan strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae adalah Strategi SO, yaitu strategi memanfaatkan peluang untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada.

Strategi SO (Strengths-Opportunities) merupakan pendekatan yang memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal, guna mengoptimalkan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae. Strategi ini berlandaskan pada pemanfaatan sumber daya yang ada serta dukungan regulasi dan program pemerintah yang relevan.

- 1) Pengembangan Kawasan Permukiman Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Pengembangan kawasan permukiman yang berlandaskan pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang adalah langkah strategis pertama. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penataan ruang yang berkelanjutan, termasuk dalam pengembangan kawasan permukiman kumuh. Dengan mengacu pada undang-undang ini, pemerintah daerah dapat merancang rencana tata ruang yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Sumpang Binangae. Implementasi yang efektif dari peraturan ini dapat mengoptimalkan penggunaan lahan, meningkatkan aksesibilitas, serta mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru.

- 2) Memanfaatkan Peran Pemerintah Sesuai UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pembinaan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas permukiman. Melalui undang-undang ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, drainase, dan pengelolaan sampah, yang menjadi dasar bagi perbaikan permukiman kumuh. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat, menjadi kunci dalam penerapan kebijakan ini untuk memastikan bahwa program-program perbaikan permukiman dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran (Republik Indonesia, 2011).
- 3) Memanfaatkan Kesadaran dan Dukungan Masyarakat
Kesadaran dan dukungan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting dalam penanganan permukiman kumuh. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program

penanganan kumuh, seperti program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Masyarakat yang terlibat akan lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya, sehingga program-program yang dijalankan lebih mungkin berhasil dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan program perbaikan permukiman dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebersihan lingkungan secara signifikan (World Bank, 2014).

4) Peningkatan Kualitas Permukiman dan Fasilitas Pendukung

Peningkatan kualitas permukiman dan fasilitas pendukungnya melibatkan perbaikan fisik infrastruktur, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan sistem drainase yang efektif, serta penyediaan sarana air bersih dan pengelolaan limbah yang memadai. Selain itu, perlu adanya program-program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan akses ke modal usaha. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan lingkungan fisik yang lebih baik, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara ekonomi (Turner, 2016).

5) Pencegahan Pencemaran Air Bersih

Upaya pencegahan pencemaran air bersih dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke laut, merupakan langkah penting lainnya. Pencemaran air tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan masyarakat tetapi juga pada lingkungan secara keseluruhan. Program-program sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapat membantu mengurangi pencemaran dan menjaga kualitas air bersih bagi masyarakat (UN-Habitat, 2015).

6) Peningkatan Sarana Pendukung Produktivitas Nelayan Sebagai wilayah dengan aktivitas nelayan yang signifikan, peningkatan sarana pendukung produktivitas nelayan, seperti penyediaan fasilitas penyimpanan ikan yang memadai, perbaikan pelabuhan, dan akses ke pasar, dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan tetapi juga mengurangi tekanan untuk mencari alternatif tempat tinggal yang lebih murah dan tidak layak huni (FAO, 2013).

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, Kelurahan Sumpang Binangae dapat mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan meraih peluang

yang ada untuk mengatasi masalah permukiman kumuh secara efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang memengaruhi permukiman kumuh (variabel Y), yaitu faktor pendapatan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, anggota keluarga, kepemilikan lahan, kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, dan pengolahan persampahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sepuluh dari sebelas variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sementara satu variabel lainnya hanya menunjukkan pengaruh lemah. Kedua, melalui analisis SWOT, strategi yang dianjurkan untuk penanganan permukiman kumuh adalah memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengoptimalkan peluang yang tersedia (Strategi SO). Strategi ini mencakup pengembangan kawasan permukiman berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memanfaatkan peran pemerintah sesuai UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan permukiman kumuh melalui program pemerintah, meningkatkan kualitas permukiman dan fasilitas pendukungnya, serta mensosialisasikan pentingnya mencegah pencemaran air bersih dengan tidak membuang sampah ke laut.

Daftar Pustaka

- Agresti, A. (2007). *An Introduction to Categorical Data Analysis*. New York: John Wiley & Sons.
- Anugrah Valentine, W.D. (2018). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Pada Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun 2018)*.
- Bayu, A.M. (2016). *Arahan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kecamatan Kenjeran Dengan Pendekatan Eco-Settlements*.
- Budiharjo, E. (2011). *Teori Permukiman Kumuh*. Jakarta: Penerbit X.
- Cora, M. (2012). *Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Cilacap Kabupaten Cilacap Melalui Peningkatan Kualitas Fisik Lingkungan*.
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diana, M.A. (2015). *Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan*.

- FAO. (2013). Improving Productivity of Fishery Communities. Food and Agriculture Organization.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *Journal of International Social Research*, 10(51), 994-1006.
- McHugh, M. L. (2013). The Chi-square test of independence. *Biochemia Medica*, 23(2), 143-149.
- Muvidayanti, S. (2018). Karakteristik dan Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Sem
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Barru. (2014). SK Bupati Nomor 345/BAPPEDA/VIII/2014 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Barru.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Pickton, D. W., & Wright, S. (1998). What's swot in strategic analysis? *Strategic Change*, 7(2), 101-109.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resa, A.M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Jurnal Teknik UIN Alauddin*, 2, 117-127.
- Turner, J. (2016). *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments*. Pantheon Books.
- UN-Habitat. (2015). *The State of Asian and Pacific Cities 2015*. United Nations Human Settlements Programme.
- World Bank. (2014). *Participation and Accountability in Urban Services*. World Bank Publications.